

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga.Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*, Cet 1, UII.Press, Yogyakarta, 2009

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra, Bandung, 2010

Amriani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Dahlang, *Kepastian Hukum Akta di Bawah Tangan dalam Perspektif Kewenangan Notaris*, 9 Al-Adl, 2016

Effendi Perrangin-Angin, *401 Pertanyaan dan Jawaban tentang Hukum Agraria.*, cet. 3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

Hans Kelsen (a) sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007

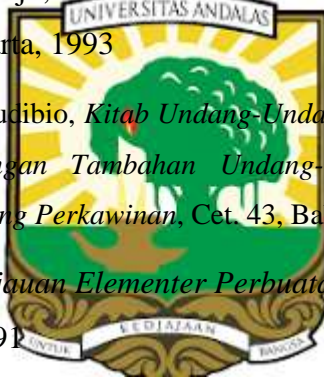
Hans Kelsen (b) sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006

Irawan Soeredjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak atas tanah di indonesia*, cet 1, Arloka, Surabaya, 2003

Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press, Citra Media, Yogyakarta, 2006

John Salihendo, *Manusia Tanah Hak, dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

- Kartaspoetra, *Hukum Tanah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977
- Leonora Bakarbesy, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2010
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galamania Indonesia, Jakarta, 1990
- R. Murjiyanto, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta, 2013
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Burberlijk Wetbook Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. 43*, Balai Pustaka, Jakarta, 2017
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991
- Saleh Adiwinata, *Pengertian Hukum Adat Menurut UUPA, cet. 2*, Alumni, Bandung, 1980
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Rajawali Pers, Depok, 2019
- Santoso Urif, *Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1991
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2002
- Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003



Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002

Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian, Wedatama Widya Sasatra dan Fakultas Hukum Ilmu Pengetahuan Budaya*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006

Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta, 2011

Wawan Setiawan, *Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti dan Otentik Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Media Notariat, No. 34-35-36-37 Edisi April-Juli-Oktober 1995, Jakarta : Ikatan Notaris Indonesia, 1995



## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Negara agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah



### C. Jurnal dan Tesis

Azmi Fendi dan Yussy A. Mannas, 2020, *Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Ditinjau dari Keberadaan Lembaga Rechtsverwerking (Studi Beberapa Sengketa Hak Milik di Kota Padang)*, Vol. 6 No. 2, Juli-Desember 2020

Azmi Fendri, Busyra Azheri, 2022, *Fundamental Principles Of Mineral And Coal Resources Management In The Regional Autonomy Era*, Kanun, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 24, No. 3, Desember 2022

Dhanang Widjawan dkk, 2021, *Implikasi Hukum Pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang Tidak Sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Akta PPAT (Studi Kasus : PPAT di Wilayah Kota Tasimkalaya)*, Jurnal Of Law, Vol. 2 No. 1, Januari 2021, hlm. 29

Erwinsyah Sulistiarto, 2008, *Pembatalan Akta Jual beli yang dibuat dihadapan PPAT Oleh putusan Mahkamah Agung Republik*

*Indonesia ( Analisa Putusan republic Indonesia nomor 2806 K/Pdt/2002), Tesis Universitas Indonesia, Depok*

Hadi Haerul Hadi dan Safiulloh, 2022, *Pembatalan oleh Hakim Terhadap Akta Jual Beli yang dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog), Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, Juli 2022*

Kunni Afifah, 2017, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 2, Januari 2017*

Junaedi Gunawan Djajaputra, 2022, *Tanggung Jawab PPAT Sementara dan Akibat Hukum Akta Jual Beli yang Dibatalkan Melalui Putusan Pengadilan, Jurnal Suara Hukum, Vol. 4, No. 3, Maret 2022*

Jovita Elizabeth, 2022, *Pembatalan Akta Jual Beli PPAT yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 17/Pdt.G/2012/PT.TK), Palar (Pakuan Law Review) Vol. 08 No. 01, Januari-Juni 2022*

Komang Febrinayanti Dantes dan I Gusti Apsari Hadi, 2021, *Kekuatan Hukum Akta Jual Beli yang Dibuat oleh Camat dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT, Juenal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9 No. 3, september 2021*

Muhammad Irayadi, 2022, *Akibat Hukum Bagi Notaris/PPAT Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Tanah, Jurnal Advokatura Indonesia, Vol. 1 No. 1, April 2022*

Muhammad Muthohar dan Amin Purnawan, 2017, *Tugas Kewenangan Camat Sebagai PPAT Sementara dalam Pembuatan Akta-Akta tentang Tanah (Studi di Kabupaten Boyolali), Jurnal Akta, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Vol. 4 No. 4*

Ulfah Yunita Wulandari, 2010, *Tanggung Jawab Camat Sebagai PPAT dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah*, Tesis Universitas Alauddin Makassar

Yazid Fandyasa, 2021, *Pembatalan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Camat) dalam Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.Kpn)*, Jurnal *Officium Notarium*, Vol. 1 No. 1, April 2021

